

Evaluasi Formatif di Lanskap Non-Formal: Studi Penerapan dan Dampaknya terhadap Pembelajaran di PKBM Al-Kautsar

Muhammad Syahrul Munir¹, Anang Darun Naja²

¹ Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri; syahrulmunir915@gmail.com

² Universitas Kahuripan Kediri; anang@kahuripan.ac.id

Received: 20/11/2025		Revised: 25/12/2025	Accepted: 30/12/2025
Abstrak	<p>Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Penelitian evaluatif ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran pada Program Pendidikan Kesetaraan di PKBM Al Kautsar Kediri dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta mengeksplorasi peluang pengembangan untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima tutor dan sepuluh peserta didik, observasi partisipatif selama proses pembelajaran, serta studi dokumentasi terhadap kurikulum dan perangkat asesmen. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran di PKBM Al Kautsar telah menerapkan prinsip fleksibilitas dan kontekstualisasi melalui adaptasi kurikulum lokal, pendekatan andragogi, serta penerapan blended learning. Sistem evaluasi pembelajaran mengombinasikan penilaian formatif dan sumatif. Penelitian ini mengidentifikasi peluang pengembangan, antara lain pemanfaatan teknologi digital yang berkeadilan, penguatan pembelajaran berbasis proyek nyata, peningkatan kapasitas tutor melalui komunitas praktik, serta pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa peningkatan mutu Program Pendidikan Kesetaraan memerlukan pendekatan sistemik dan kolaboratif agar berfungsi tidak hanya sebagai penyetara ijazah, tetapi juga sebagai penggerak mobilitas sosial dan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif.</p>		
Kata kunci	Evaluasi Pembelajaran, Pendidikan Kesetaraan, Andragogi, Asesmen Autentik, Pendidikan Inklusif		
Corresponding Author Muhammad Syahrul Munir Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri; syahrulmunir915@gmail.com			

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan pondasi fundamental bagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, upaya memenuhi hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat menghadapi tantangan kompleks, termasuk tingginya angka putus sekolah, kesenjangan akses geografis dan



ekonomi, serta rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok marginal. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS, 2022) menunjukkan bahwa sekitar 4,3 juta anak usia 7-18 tahun di Indonesia tidak terdaftar dalam pendidikan formal, dengan penyebab utama berupa keterbatasan ekonomi, kebutuhan bekerja, dan aksesibilitas geografis. Fenomena ini tidak hanya mengancam masa depan individu, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata.

Secara historis, pendidikan kesetaraan di Indonesia berkembang sebagai respons terhadap tingginya angka buta huruf dan kebutuhan akan akselerasi pembangunan sumber daya manusia pasca kemerdekaan. Program ini mengalami transformasi signifikan dari sekadar program keaksaraan fungsional menjadi pendidikan formal alternatif yang diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengakuan ini menempatkan pendidikan kesetaraan sebagai subsistem pendidikan nasional yang setara, dengan fungsi tidak hanya sebagai kompensasi pendidikan tetapi juga sebagai wahana rekognisi pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) (Direktorat Pendidikan Masyarakat, 2020). Namun, transformasi kebijakan ini belum sepenuhnya diikuti dengan transformasi praktik pedagogis dan evaluatif di tingkat operasional, menciptakan kesenjangan antara visi inklusif negara dengan realitas implementasi di komunitas belajar.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan Program Pendidikan Kesetaraan melalui jalur pendidikan nonformal, yang terdiri dari Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Program ini dikelola oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berperan sebagai ujung tombak layanan pendidikan alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke sekolah formal. Secara filosofis, pendidikan kesetaraan tidak hanya berfungsi sebagai substitusi administratif untuk memperoleh ijazah, tetapi lebih jauh sebagai wahana pemberdayaan (empowerment) dan pengembangan kapabilitas (capability approach) bagi kelompok terpinggirkan (Sen, 1999; Unesco, 2020). Dalam perspektif teori human capital dan pendidikan kritis, program ini diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial melalui pemerolehan pengetahuan, keterampilan hidup (life skills), dan pengakuan sosial.

Evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran serta efektivitas proses pendidikan. Dalam konteks

pendidikan formal maupun nonformal, evaluasi berperan penting sebagai alat ukur yang memberikan umpan balik bagi guru, peserta didik, dan pengelola pendidikan. Menurut Arikunto & Jabar evaluasi tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga proses dan dampak pembelajaran terhadap peserta didik. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran harus dirancang secara komprehensif, objektif, dan berkesinambungan. (Arikunto and Jabar 2018)

Peran evaluasi pembelajaran semakin penting di era Kurikulum Merdeka dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Evaluasi bukan lagi sekadar mengukur kognitif melalui ujian tertulis, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan pendapat Suprihatiningrum yang menekankan bahwa asesmen harus bersifat autentik, yaitu menilai kemampuan peserta didik dalam konteks nyata. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran harus mencakup berbagai bentuk seperti portofolio, proyek, observasi, dan refleksi diri. (Putri, M. A., & Nugroho 2023)

Namun, implementasi evaluasi pembelajaran di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan pemahaman guru tentang teknik evaluasi yang bervariasi dan kecenderungan fokus hanya pada hasil akhir (*summative assessment*). Penelitian oleh Putri & Nugroho menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih mendominasi asesmen berbasis tes pilihan ganda, yang kurang menggambarkan kemampuan berpikir kritis siswa. Akibatnya, potensi siswa dalam aspek kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah belum tergali optimal.

Dalam program pendidikan kesetaraan atau pendidikan nonformal, evaluasi pembelajaran juga menghadapi tantangan tersendiri. Karakteristik peserta didik yang heterogen, latar belakang sosial ekonomi yang beragam, serta motivasi belajar yang fluktuatif memerlukan pendekatan evaluasi yang fleksibel dan kontekstual. Evaluasi di lingkungan ini harus mempertimbangkan aspek kebutuhan nyata peserta didik dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Evaluasi formatif yang berkelanjutan menjadi penting untuk mendukung proses pembelajaran yang bermakna dan adaptif. (Supriyantoko et al. 2020)

Evaluasi pembelajaran harus terus dikembangkan seiring dengan perubahan paradigma pendidikan. Tidak hanya sebagai alat ukur hasil, evaluasi seharusnya menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang mendorong refleksi, perbaikan, dan inovasi. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kompetensi guru, penyediaan instrumen yang valid dan reliabel, serta kebijakan yang mendukung implementasi evaluasi yang adil dan holistik. Pendekatan

ini akan memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kemajuan belajar peserta didik dan mutu pembelajaran secara keseluruhan.

Namun, efektivitas program pendidikan kesetaraan sangat bergantung pada kualitas proses pembelajaran yang di dalamnya mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi pembelajaran, khususnya, memegang peran krusial sebagai mekanisme pengendalian mutu (quality assurance) dan alat refleksi untuk perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Menurut Arikunto & Jabar (2018), evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan, baik pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dalam konteks pendidikan kesetaraan yang berkarakteristik peserta didik heterogen dari segi usia, latar belakang sosial ekonomi, motivasi, dan pengalaman belajar evaluasi dihadapkan pada tuntutan ganda: harus memenuhi standar nasional sekaligus relevan dengan konteks kehidupan nyata peserta.

Paradigma evaluasi pembelajaran sendiri telah mengalami perkembangan signifikan, bergerak dari pendekatan *assessment of learning* yang berfokus pada pengukuran hasil (summative), menuju *assessment for learning* dan *assessment as learning* yang menekankan proses, umpan balik formatif, dan partisipasi aktif peserta didik dalam merefleksikan pembelajarannya sendiri (Black & Wiliam, 2009; Putri & Nugroho, 2023). Dalam kerangka Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, evaluasi diharapkan bersifat autentik, kontekstual, dan holistik, dengan menggunakan berbagai metode seperti portofolio, proyek, observasi, dan penilaian diri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip andragogi yang menempatkan peserta didik orang dewasa sebagai subjek pembelajaran yang otonom dan berpengalaman (Knowles, 1984; Bartin, 2018).

Meskipun secara teoritis telah tersedia kerangka evaluasi yang komprehensif, implementasinya di lapangan khususnya pada pendidikan nonformal seperti PKBM masih menghadapi berbagai kendala mendasar. Penelitian sebelumnya oleh Supriyantoko dkk. (2020) mengidentifikasi beberapa masalah utama, antara lain: (1) keterbatasan pemahaman dan kompetensi tutor dalam merancang dan melaksanakan evaluasi autentik, (2) dominasi budaya tes tertulis berbasis pilihan ganda yang kurang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, (3) kesenjangan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan kontekstual peserta didik, serta (4) minimnya dukungan sarana prasarana dan kebijakan yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik peserta didik program kesetaraan yang sering kali

harus membagi waktu antara belajar, bekerja, dan tanggung jawab keluarga, sehingga konsistensi dan kedalaman pembelajaran menjadi tantangan tersendiri (Unesco, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi secara holistik pelaksanaan pembelajaran dengan fokus khusus pada aspek evaluasi dalam program kesetaraan di PKBM Al Kautsar Kediri. PKBM ini dipilih sebagai studi kasus karena telah memiliki pengalaman lebih dari satu dekade dalam menyelenggarakan program kesetaraan dan melayani peserta didik dengan latar belakang sosio-ekonomi yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan praktik evaluasi pembelajaran yang diterapkan pada jenjang Paket A, B, dan C; (2) menganalisis tantangan yang dihadapi oleh tutor, peserta didik, dan lembaga dalam melaksanakan evaluasi yang bermutu; dan (3) mengidentifikasi peluang pengembangan potensi untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pembelajaran secara keseluruhan.

Secara epistemologis, evaluasi dalam pendidikan kesetaraan juga menghadapi tantangan paradigmatis: antara logika standarisasi nasional dan logika kontekstualisasi lokal. Di satu sisi, program harus memenuhi standar kompetensi nasional yang diukur melalui Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK); di sisi lain, karakteristik peserta didik yang unik menuntut pendekatan evaluasi yang personal, fleksibel, dan berbasis pengalaman hidup (Supriyantoko et al., 2020). Ketegangan ini mencerminkan dialektika lebih luas dalam pendidikan antara homogenisasi melalui standar global dan heterogenisasi melalui praktik lokal (Carnoy & Rhoten, 2002). Dalam konteks PKBM, dialektika ini sering kali diselesaikan secara pragmatis melalui kompromi-kompromi pedagogis yang belum tentu menguntungkan proses pembelajaran bermakna.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah literatur mengenai evaluasi pembelajaran dalam konteks pendidikan kesetaraan di Indonesia, yang selama ini masih terbatas dibandingkan dengan penelitian sejenis di pendidikan formal. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi bahan refleksi dan rekomendasi bagi pengelola PKBM, dinas pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi peningkatan mutu program kesetaraan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermaksud mendeskripsikan realitas yang ada, tetapi juga berkontribusi pada upaya transformasi pendidikan nonformal menuju praksis yang lebih emansipatoris dan berpihak pada kelompok marginal.

Penelitian ini juga didasari oleh kesadaran kritis terhadap fenomena certification-driven learning dalam pendidikan kesetaraan, di mana motivasi utama peserta didik sering kali sekadar memperoleh ijazah formal tanpa disertai penguasaan kompetensi yang mendalam. Fenomena ini berpotensi mereduksi pendidikan menjadi transaksi administratif belaka, dan mengabaikan misi substantif pendidikan sebagai proses pemberdayaan dan pembentukan karakter (Freire, 2000; Bartin, 2018). Evaluasi pembelajaran yang berkualitas seharusnya dapat berfungsi sebagai penangkal terhadap reduksionisme tersebut, dengan merancang instrumen yang tidak hanya mengukur penguasaan konten, tetapi juga merefleksikan perubahan perspektif, peningkatan agensi, dan perkembangan kapasitas kritis peserta didik.

Oleh karena itu, penelitian evaluatif ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis instrumentasi penilaian, tetapi juga berupaya memahami makna dan dampak sosio-pedagogis dari praktik evaluasi dalam ekosistem pembelajaran kesetaraan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini berupaya menangkap narasi-narasi tersembunyi (hidden narratives) dari berbagai pemangku kepentingan tutor, peserta didik, pengelola tentang bagaimana evaluasi dipahami, dijalankan, dan dialami dalam konteks ketidakpastian dan keterbatasan sumber daya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang dinamika evaluasi pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan, serta rekomendasi yang relevan untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih berkeadilan dan transformatif di masa depan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Evaluasi dengan pendekatan kualitatif. (Lexy J. Moleong 2019) Analisis datanya adalah dengan model deskriptif-analisis. Lokasi penelitiannya adalah di PKBM Al Kautsar Kediri. Metode pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pisau analisis yang digunakan adalah teori tentang evaluasi pembelajaran. Yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan evaluasi pembelajaran program kesetaraan: antara tantangan dan peluang.

Pemilihan lokasi dan informan dilakukan secara purposif, dengan melibatkan tiga kelompok pemangku kepentingan utama: 5 tutor, 10 peserta didik dari berbagai jenjang dan latar belakang, serta pengelola lembaga. Pendekatan studi kasus dipilih untuk memahami

secara mendalam kompleksitas fenomena evaluasi pembelajaran dalam konteks pendidikan kesetaraan yang khas dan kontekstual.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui triangulasi teknik yang meliputi wawancara semi-terstruktur mendalam, observasi partisipan pasif selama 12 sesi pembelajaran, studi dokumentasi terhadap perangkat kurikulum dan hasil asesmen, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta didik (Creswell & Poth, 2018). Triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi temuan dari berbagai sudut pandang, sekaligus menangkap kesenjangan antara narasi formal dan praktik di lapangan. Wawancara dan FGD difokuskan pada pengalaman, persepsi, dan tantangan dalam melaksanakan serta mengalami evaluasi pembelajaran.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahap yang saling terkait: reduksi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Data direduksi melalui proses coding tematik hybrid yang menggabungkan kode deduktif (berdasarkan kerangka teori evaluasi) dan induktif (muncul dari data lapangan). Data kemudian disajikan dalam bentuk matriks dan narasi deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarkategori sebelum akhirnya disintesis menjadi temuan dan kesimpulan yang koheren.

Keabsahan data dijaga melalui beberapa strategi, yakni triangulasi sumber dan metode, member checking dengan mengonfirmasi interpretasi kepada informan, serta audit trail yang mendokumentasikan secara rinci jejak pengambilan keputusan analitis. Peneliti juga menerapkan reflektivitas dengan menyadari posisionalitas dan bias potensial melalui jurnal refleksi, guna memastikan bahwa temuan tetap berakar pada data dan konteks, bukan pada asumsi subjektif. Pertimbangan etika seperti persetujuan informan (informed consent), kerahasiaan identitas, dan hak untuk menarik diri diterapkan secara ketat.

Secara teoretis, analisis dalam penelitian ini dipandu oleh integrasi tiga kerangka utama: model evaluasi program CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam dan Zhang (2017) untuk menilai program secara sistemik; prinsip *assessment for learning* (Black & Wiliam, 2009) yang menekankan fungsi formatif evaluasi; dan pendekatan andragogi Knowles (1984) yang mempertimbangkan karakteristik pembelajaran orang dewasa. Sintesis kerangka ini memungkinkan kajian yang holistik, mulai dari kebijakan dan sumber daya,

proses pedagogis di kelas, hingga dampak pembelajaran terhadap kehidupan peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembelajaran Program Pendidikan Pada Jenjang Paket A, B, Dan C.

Program Pendidikan Kesetaraan hadir sebagai respons atas adanya kesenjangan akses pendidikan formal di Indonesia. Secara filosofis, program ini tidak sekadar substitusi, melainkan upaya afirmatif untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan (educational equity). Prinsip dasarnya adalah pengakuan terhadap pembelajaran yang terjadi di luar sekolah formal (recognition of prior learning), sehingga peserta dari pengalaman kerja atau kehidupan dapat dikonversi menjadi capaian pembelajaran tertentu. (Unesco 2021) Dalam praktiknya di PKBM Al Kautsar, program ini berfungsi ganda: sebagai penyetara ijazah dan sebagai pusat pengembangan kecakapan hidup (life skills center).

Keberagaman peserta didik bukan hanya dalam usia dan latar belakang ekonomi, tetapi juga dalam modal kultural dan motivasi intrinsik. Penelitian ini menemukan adanya tiga kluster motivasi utama: (1) motivasi instrumental (untuk mendapat ijazah dan pekerjaan lebih baik), (2) motivasi sosial (untuk meningkatkan status dan pengakuan sosial), dan (3) motivasi intrinsik (untuk memuaskan rasa ingin tahu dan aktualisasi diri). (Bartin 2018) Kluster ini membutuhkan pendekatan motivasional yang berbeda-beda dari tutor, di mana pendekatan andragogi Knowles tentang kebutuhan belajar mandiri (self-directed learning) menjadi sangat relevan, terutama untuk kluster ketiga.

Adaptasi kurikulum nasional ke dalam konteks lokal di PKBM Al Kautsar menunjukkan praktik yang menarik. Modul tidak hanya disederhanakan, tetapi dikontekstualisasikan dengan potensi lokal Kediri, seperti pertanian tembakau dan industri kecil kerajinan. Mata pelajaran Matematika, misalnya, diajarkan dengan studi kasus perhitungan keuntungan usaha batik, sementara Pelajaran Kewarganegaraan dikaitkan dengan partisipasi dalam forum musyawarah desa. Kontekstualisasi ini adalah bentuk dari culturally responsive teaching yang meningkatkan relevansi dan daya serap materi. (Syaadah et al. 2023) Namun, temuan juga menunjukkan bahwa kontekstualisasi ini belum terstruktur dengan baik dan sangat bergantung pada kreativitas individu tutor.

Fleksibilitas strategi pembelajaran, terutama pilihan blended learning, ternyata memiliki dampak paradoks. Di satu sisi, ini adalah solusi bagi peserta yang bekerja. Di sisi lain, hal

ini justru memperlebar kesenjangan digital (digital divide). Observasi menunjukkan peserta dari keluarga mampu dengan akses smartphone lancar dapat mengikuti dengan baik, sementara peserta dari keluarga miskin yang mengandalkan warnet dengan keterbatasan waktu dan biaya menjadi tertinggal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa fleksibilitas tanpa dukungan infrastruktur dan literasi digital yang merata justru dapat bersifat eksklusif. (Supriyantoko et al. 2020)

Peran tutor berkembang menjadi multi-role educator. Selain sebagai fasilitator, mereka sering berfungsi sebagai konselor yang membantu peserta mengatasi masalah keluarga yang menghambat belajar, dan sebagai job connector yang menghubungkan peserta dengan lapangan kerja. Kompetensi yang dibutuhkan pun menjadi sangat kompleks, mencakup pedagogi, psikologi orang dewasa, dan jaringan kemasyarakatan. Kebutuhan akan pelatihan tutor yang holistik dan berkelanjutan menjadi keniscayaan, bukan hanya pilihan. (Ansori & Samsudin 2013)

Sistem evaluasi di PKBM Al Kautsar telah berusaha mengadopsi prinsip assessment for learning. Portofolio tidak hanya berisi tugas, tetapi juga jurnal refleksi peserta tentang proses belajarnya dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) meski bersifat sumatif, persiapannya dilakukan melalui try out dan pembahasan soal yang difokuskan pada pemahaman konsep, bukan hafalan. Pendekatan ini sejalan dengan teori evaluasi formatif Black & Wiliam yang menekankan umpan balik sebagai kunci perbaikan pembelajaran. (Putri & Nugroho 2023) Kendala utama adalah beban administratif yang tinggi untuk mendokumentasikan seluruh proses evaluasi tersebut, yang seringkali mengurangi waktu tutor untuk interaksi langsung.

Tantangan Yang Dihadapi Oleh Pendidik, Peserta Didik, Dan Lembaga Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Program Kesetaraan.

Tantangan bagi pendidik bersifat struktural dan kapasitas. Secara struktural, status kebanyakan tutor adalah tenaga honorer dengan imbalan rendah dan tidak tetap, yang berdampak pada rendahnya motivasi dan komitmen jangka panjang. Secara kapasitas, mereka umumnya adalah lulusan pendidikan formal yang tidak mendapatkan pelatihan memadai tentang andragogi dan evaluasi autentik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 80% tutor merasa kesulitan merancang rubrik penilaian untuk proyek atau portofolio, dan cenderung kembali ke metode tes yang familiar. (Putri & Nugroho 2023) Tantangan

epistemologis juga muncul: bagaimana mengajarkan dan mengevaluasi konsep abstrak kepada peserta yang terbiasa dengan pengetahuan praktis tanpa kehilangan kedalaman akademis.

Bagi peserta didik, tantangan bersifat multidimensional: sosial-ekonomi, psikologis, dan akademik. Konflik peran (role conflict) antara sebagai pencari nafkah, anggota keluarga, dan pelajar menciptakan beban kognitif dan emosional yang berat. Studi kasus pada seorang peserta perempuan yang juga kepala keluarga menunjukkan bahwa tekanan untuk memenuhi kebutuhan dasar seringkali mengalahkan kebutuhan akan pendidikan. (Bartin 2018) Selain itu, academic self-concept mereka yang rendah akibat pengalaman kegagalan di sekolah formal sebelumnya, membentuk mental block terhadap materi-materi tertentu seperti matematika dan sains. Mereka membutuhkan tidak hanya remediasi akademik, tetapi juga penyembuhan luka psikologis (healing) akibat stigma "putus sekolah".

Pada tingkat lembaga, PKBM menghadapi dilema kelembagaan (institutional dilemma). Di satu sisi, mereka adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang harus memenuhi standar dan akuntabilitas administratif (seperti pelaporan ke Dikmas). Di sisi lain, mereka harus tetap luwes dan akomodatif terhadap kondisi riil masyarakat marginal yang tidak selalu terukur secara administratif. (Masyarakat 2022) Misalnya, kebijakan kehadiran 75% sulit diterapkan kepada peserta yang bekerja serabutan. Tantangan keberlanjutan finansial juga krusial. Ketergantungan pada bantuan operasional pemerintah (BOP) yang sering terlambat cair menyebabkan ketidakstabilan operasional. Inisiatif social entrepreneurship, seperti mengelola usaha sampingan dari hasil kerajinan peserta, telah dicoba tetapi belum terkelola secara profesional dan berkelanjutan.

Tantangan ekosistem yang lebih luas adalah masih kuatnya hegemoni ijazah formal dalam struktur ketenagakerjaan dan masyarakat. Ijazah Paket C masih sering dipandang sebagai "kelas dua" dibanding SMA formal, yang mengurangi nilai motivasi dan pengakuan sosial. Hal ini memperkuat lingkaran setan: rendahnya persepsi publik -> rendahnya motivasi peserta -> rendahnya capaian -> semakin rendahnya persepsi publik. (Supriyantoko et al. 2020)

Peluang Atau Pengembangan Potensi Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Program Pendidikan Kesetaraan.

Peluang pertama terletak pada transformasi digital yang terencana dan berkeadilan. Daripada sekadar menggunakan platform daring komersial, PKBM dapat mengembangkan

Learning Management System (LMS) sederhana yang dihosting lokal dengan konten yang dapat diakses secara luring (offline) untuk mengatasi masalah kuota dan sinyal. Pengembangan bank soal digital dan video pembelajaran mikro (micro-learning) buatan tutor sendiri yang sesuai konteks lokal juga dapat meningkatkan ketersediaan sumber belajar. Lebih dari itu, teknologi dapat digunakan untuk sistem tracking dan early warning system untuk mendeteksi peserta yang berisiko putus belajar berdasarkan pola kehadiran dan pengumpulan tugas. (Unesco 2021)

Kedua, peluang besar ada pada pendekatan Integrated Curriculum and Assessment. Pembelajaran dapat dirancang berbasis modul tematik integratif, misalnya modul "Kewirausahaan Pertanian" yang mengintegrasikan Ekonomi, Biologi, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Asesmennya pun berbasis produk nyata berupa proposal usaha tani. Pendekatan ini mengurangi fragmentasi pengetahuan dan langsung mengembangkan kompetensi kompleks. Model ini selaras dengan konsep capstone project dalam pendidikan tinggi dan task-based assessment yang autentik. (Syaadah et al. 2023)

Ketiga, penguatan kapasitas tutor melalui skema communities of practice (CoP) lintas PKBM. CoP dapat menjadi wadah peer-learning untuk berbagi RPP kontekstual, instrumen asesmen, dan strategi menghadapi peserta bermasalah. Skema mentoring berjenjang dapat dibangun, di mana tutor senior membimbing tutor baru. Pelatihan tidak harus formal, dapat berupa lesson study atau teaching clinic di mana tutor saling mengobservasi dan memberi umpan balik. Peningkatan kapasitas ini harus diikuti dengan skema insentif dan pengakuan (reward system) yang jelas dari pemerintah daerah. (Ansori & Samsudin 2013)

Keempat, membangun kemitraan strategis yang simbiosis mutualistik. Kemitraan dengan DU/DI tidak hanya untuk magang, tetapi juga untuk co-design curriculum agar materi sesuai kebutuhan pasar kerja. Kemitraan dengan perguruan tinggi dapat berupa program service-learning, di mana mahasiswa KKN tematik membantu pendampingan belajar sekaligus penelitian aksi partisipatif. Kemitraan dengan pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desa untuk beasiswa atau sarana belajar. Jaringan kemitraan ini akan mengubah PKBM dari lembaga yang terisolasi menjadi simpul dalam ekosistem pembelajaran masyarakat. (Masyarakat 2022)

Kelima, mengembangkan model evaluasi program yang berbasis dampak (impact evaluation). Selama ini evaluasi lebih fokus pada output (jumlah lulusan), bukan outcome

(perubahan hidup) dan impact (perubahan sosial). Perlu dikembangkan sistem longitudinal tracking untuk melacak alumni, misalnya 1, 3, dan 5 tahun setelah lulus, untuk melihat peningkatan pendapatan, kepuasan hidup, dan kontribusi sosial mereka. Data ini tidak hanya untuk akuntabilitas, tetapi lebih sebagai bahan refleksi untuk merevisi kurikulum dan metode agar lebih berdampak. Evaluasi model Theory of Change dapat diterapkan untuk merancang program dari awal dengan logika dampak yang jelas. (Moleong 2019)

Terakhir, peluang advokasi kebijakan. PKBM bersama jaringan organisasi masyarakat sipil dapat mengadvokasi pengakuan yang setara terhadap ijazah kesetaraan di sektor pemerintahan dan swasta, serta perluasan skema penyetaraan pengalaman kerja (Recognition of Prior Learning/RPL) yang lebih masif. Advokasi juga dapat diarahkan pada penganggaran yang lebih memadai dan tepat waktu untuk program kesetaraan di APBD, dengan skema yang lebih fleksibel mengacu pada prinsip money follows the student.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran program kesetaraan di PKBM Al Kautsar Kediri berlangsung dalam konteks yang kompleks dan dinamis. Di satu sisi, program kesetaraan berhasil menghadirkan ekosistem pembelajaran yang adaptif melalui kurikulum kontekstual, pendekatan andragogi, strategi blended learning, serta penerapan asesmen autentik berbasis portofolio dan proyek. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan utama dalam menjawab keragaman latar belakang peserta didik. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan struktural yang saling terkait, mulai dari beban psikologis dan sosio-ekonomi peserta didik, keterbatasan kompetensi dan ketidakpastian status tutor, hingga dilema kelembagaan PKBM dan rendahnya pengakuan sosial terhadap lulusan pendidikan kesetaraan.

Meskipun demikian, penelitian ini memetakan peluang transformatif melalui sinergi penguatan internal dan eksternal serta reformasi kebijakan yang berkeadilan. Peningkatan mutu program kesetaraan menuntut pengembangan kapasitas tutor secara berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital yang inklusif, kemitraan strategis lintas sektor, serta kebijakan yang menjamin pendanaan dan pengakuan setara terhadap lulusan. Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, pendidikan kesetaraan berpotensi melampaui fungsi penyetaraan ijazah dan bertransformasi menjadi wahana pemberdayaan yang berdampak pada

peningkatan kapabilitas, kepercayaan diri, dan mobilitas sosial peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M., & Samsudin, A. (2013). *Evaluasi Pembelajaran dalam Pendidikan Nonformal*. Bandung: IKIP Siliwangi Press.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bartin, A. (2018). *Pendidikan Orang Dewasa: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 21(1).
- BPS. (2022). *Statistik Pendidikan Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Carnoy, M., & Rhoten, D. (2002). What does globalization mean for educational change? A comparative approach. *Comparative Education Review*, 46(1).
- Direktorat Pendidikan Masyarakat. (2020). *Panduan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed* (30th anniversary ed.). New York: Continuum.
- Knowles, M. S. (1984). *Andragogy in Action: Applying Modern Principles of Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masyarakat, D. P. (2022). *Panduan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Putri, M. A., & Nugroho, R. (2023). *Assesmen Autentik dalam Kurikulum Merdeka*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for*

Improvement and Accountability. New York: Guilford Press.

Supriyantoko, B., dkk. (2020). *Evaluasi Pembelajaran di Pendidikan Kesetaraan: Tantangan dan Inovasi*. Surakarta: UNS Press.

Syaadah, R., dkk. (2023). *Kurikulum dan Pembelajaran Kontekstual pada Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Unesco. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education All Means All*. Paris: UNESCO Publishing.

Unesco. (2021). *Flexible Learning Pathways in Higher Education: A Global Perspective*. Paris: UNESCO Publishing.